

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tenaga kerja asing atau *Migrant Workers* merupakan masyarakat suatu warga negara yang bekerja di negara lain. Pada tahun 2010 terdapat sekitar 27,5 juta migran, dimana 10,2 jutanya berasal dari Asia Tenggara. Jumlah keseluruhan migran di Asia Tenggara mencapai 6,7 juta orang yang bekerja di sesama negara Asia Tenggara. Sebanyak 3,2 juta bekerja di Amerika Serikat dan sisanya bekerja di negara-negara teluk seperti Arab Saudi.<sup>1</sup> Malaysia dan Thailand adalah negara yang paling banyak menerima tenaga kerja asing dari negara tetangganya yaitu Kamboja, Indonesia, Myanmar, dan Filipina.<sup>2</sup> Indonesia sendiri pada tahun 2014 telah mengirimkan sebanyak 429.872 TKI ke luar negeri, 275.736 TKI pada tahun 2015, dan 234.451 TKI pada tahun 2016.<sup>3</sup>

Kurang tersedianya lapangan pekerjaan dan tingkat pendidikan yang rendah berdampak kepada peningkatan angka pengangguran di negara ini. Sejak tahun 2014 hingga 2016, angka pengangguran berkisar antara 7 juta hingga 7,5 juta

---

<sup>1</sup> Mahidol Migration Centre, *Migrants Workers Rights to Social Protection in ASEAN, Case Studies of Indonesia, Phillipines, Singapore, and Thailand*, Singapore: Friedrich-Ebert-Stiftung, hal. 9

<sup>2</sup> *Rencana Strategis 2015-2019*, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, hal. 16

<sup>3</sup> *Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi, BNP2TKI, hal.1

orang<sup>4</sup>. Pada tahun 2017, jumlah pengangguran di Indonesia adalah sebanyak 7,04 juta orang dari total angkatan kerja sebesar 128 juta orang. Pengangguran di Indonesia meningkat sebanyak 10.000 orang dari tahun 2016.<sup>5</sup> Data dari BPS memperlihatkan bahwa, dari tahun ke tahun lulusan SMA dan SMK selalu menjadi kontributor terbesar dalam Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Menurut Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), Nusron Wahid, kurangnya lapangan pekerjaan membuat banyak masyarakat Indonesia tertarik untuk bekerja di luar negeri.<sup>6</sup> Migrasi akan terus terjadi jika masih ada ketimpangan antara tenaga kerja produktif dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Wahid menjelaskan bahwa pada tahun 2015, dari keseluruhan 2,8 juta angkatan kerja di Indonesia hanya terserap sebesar 1,5 juta. Sisanya, yaitu 1,3 juta masuk kedalam kategori TPT. Umumnya masyarakat pedesaan mencari pekerjaan ke kota-kota besar, dan ketika tidak tersedia lapangan kerja di perkotaan, maka mereka akan mencoba mencarinya di luar negeri.

Menurut Tohari, Staff Fungsi Konsuler Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru (KJRI JB) faktor yang mempengaruhi para TKI untuk datang bekerja di Malaysia adalah faktor geografis<sup>7</sup>. Faktor kedekatan geografis ini

---

<sup>4</sup> Data diolah dari *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2016*, Berita Resmi Statistik No.46/05/Th.XIX, 04 Mei 2016, Badan Pusat Statistik, hal. 1

<sup>5</sup> *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2017*, Berita Resmi Statistik N0.103/11/Th.XX, 06 November 2017, Badan Pusat Statistik, hal. 3

<sup>6</sup> Yohannie Linggasari, *Indonesia Kurang Lapangan Kerja, Migrasi Tidak Terhindarkan*, CNN Indonesia (08 Maret 2015), diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150308230701-20-37658/indonesia-kurang-lapangan-kerja-migrasi-tidak-terhindarkan>, (02/04/2018, 10:58 WIB)

<sup>7</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Tohari, Staff Konsuler KJRI JB pada 30 Januari 2018

kemudian ditunjang dengan murah nya tiket transportasi dan efisiensi waktu untuk pergi ke Malaysia. Selain itu menurut Tohari, faktor kesamaan budaya dan bahasa juga mempengaruhi para TKI untuk datang ke Malaysia. Tohari mengatakan bahwa para majikan di Malaysia, terkadang tidak terlalu menuntut keahlian atau *background* pendidikan tinggi kepada para TKI. Para majikan lebih mengutamakan etos kerja dan pengalaman, khususnya pada sektor informal, sektor perkebunan dan perladangan. Hal ini dapat dilihat dari Data Penempatan TKI berdasarkan Status Perkawinan dan Pendidikan Tahun 2016, dimana setiap tahunnya, secara keseluruhan, TKI lulusan SMP dan SMA yang selalu mendominasi.<sup>8</sup> Ketiga faktor inilah yang menurut Tohari banyak mempengaruhi para TKI untuk mencari rezeki di Malaysia.

Malaysia pada dasarnya memiliki ketergantungan besar terhadap pekerja asing karena kurangnya minat masyarakat pada beberapa sektor seperti konstruksi dan perkebunan. Masyarakat Malaysia menganggap bahwa kedua sektor tersebut susah, berbahaya, dan kotor (*difficult, dirty, and dangerous*).<sup>9</sup> Selain itu, mereka cenderung lebih suka untuk bekerja di gedung-gedung perkantoran atau perbelanjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Akibatnya sektor-sektor tersebut kekurangan pasokan tenaga kerja lokal, dan sebagai dampaknya, perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tersebut mengimpor jasa para buruh asing ke

---

<sup>8</sup> *Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016, Loc.Cit.*, hal.2

<sup>9</sup> Pook Ah Lek, *The Dilemma of Having Foreign Workers in Malaysia*, The Straits Time (17 September 2016), <http://www.straitstimes.com/opinion/the-dilemma-of-having-foreign-workers-in-malaysia>, diakses pada 6 Desember 2017

Malaysia. Baik perusahaan maupun majikan yang mempekerjakan buruh asing lebih memilih pekerja dari luar negeri daripada pekerja lokal karena upah yang murah dan juga siap untuk bekerja lembur.

Lebih lanjut, berdasarkan Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dikeluarkan oleh BNP2TKI menunjukkan bahwa penempatan TKI ke Malaysia pada tahun 2016 mencapai angka 87.616 orang. Sebelumnya, pada tahun 2015 sebanyak 97.621 orang dan tahun 2014 sebanyak 127.812 orang.<sup>10</sup> Setiap tahunnya, sektor informal masih menjadi pilihan para TKI yang berangkat ke Malaysia, yaitu sebanyak 126.846 orang pada tahun 2016. Malaysia masih menjadi destinasi favorit para TKI, meskipun mengalami penurunan angka pengiriman, karena tingginya permintaan. Adapun mengenai jumlah TKI ilegal sangat sulit untuk diketahui jumlah pastinya karena tidak terdaftar di SISKOTKLN. Pemerintah Indonesia hanya dapat membuat perkiraan.

Berdasarkan data yang dilansir dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan jumlah TKI ilegal Malaysia pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 1.250.000 orang. Presiden Kongres Kesatuan Pekerja Malaysia (MTUC) , Mohd Khalid Atan, mengatakan bahwa TKA ilegal di Malaysia memiliki rasio dua kali ganda dibanding TKA legal. Keberadaan buruh migran di Malaysia berdampak kepada peningkatan kriminalitas di negara tersebut.

---

<sup>10</sup> Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi BNP2TKI, *Loc.Cit.*, hal.1

Tercatat dari Januari hingga September 2016, terdapat kurang lebih 14.413 kasus. Antara kasus yang sering dilakukan adalah penyalahgunaan obat terlarang, seks komersial, dan kekerasan. Kasus kekerasan juga meningkat sebanyak 1.780 kasus pada tahun 2016, dibandingkan tahun 2015.<sup>11</sup>

Salah satu upaya Pemerintah Malaysia untuk menyelesaikan permasalahan buruh migran ilegal adalah dengan meluncurkan program *rehiring* di tahun 2016 yang lebih masif lagi daripada program 6P pada masa Presiden SBY, serta melakukan razia besar-besaran. Para buruh migran ilegal tidak terkecuali TKI yang tertangkap akan dijabloskan ke penjara sebelum pada akhirnya dipulangkan. Program tersebut dinilai belum dapat mengurangi jumlah buruh migran ilegal di Malaysia. Menurut Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono bahwa tingkat partisipasi TKI dalam program *rehiring* sangat rendah, yaitu 1,7 persen dibandingkan dengan Bangladesh yang mencapai 7 persen lebih.<sup>12</sup> Angka tersebut sangat rendah mengingat terdapat sekitar 2,5 juta buruh migran ilegal di Malaysia, dimana sebanyak 54 persen atau sekitar 1,3 juta adalah warganegara Indonesia. Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan Malaysia menargetkan 600 ribu pekerja migran pada gelombang pertama sebelum perpanjangan. Namun yang

---

<sup>11</sup> Evelyn Devadason, *Policy Chaos Over Migrant Workers in Malaysia*, East Asia Forum (11 January 2011), <http://www.eastasiaforum.org/2011/01/11/policy-chaos-over-migrant-workers-in-malaysia/>, diakses pada 6 Desember 2017

<sup>12</sup> Kristian Erdianto, *Program "Rehiring" Malaysia Tak Mampu Tekan Tingginya TKI Ilegal*, Kompas (07 Juli 2017), diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/07/21590791/program.rehiring.malaysia.tak.mampu.tekan.tingginya.tki.ilegal> (10/07/2018, Pukul 21:29 WIB)

teralisasi hanya 161.065 buruh migran dimana jumlah TKI ilegal hanya 13 ribu dan 21.000 majikan. Kepentingan Malaysia untuk mengatasi permasalahan buruh migran ilegal, sejalan dengan kepentingan Pemerintah Indonesia.

Selama ini pemerintah Indonesia dan Malaysia telah membuat suatu kesepakatan terkait Pengiriman dan Penempatan TKI di Malaysia melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia Tentang Rekrutmen dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia Tahun 2006 dan MoU Tentang Penempatan TKI di Malaysia Tahun 2004 khusus untuk sektor formal. Namun, MoU tersebut telah kadaluarsa, sehingga pada saat ini pemerintah tidak memiliki mekanisme yang jelas dalam penanganan TKI ilegal.

Mengingat banyaknya TKI ilegal dan permasalahan yang kerap terjadi setiap tahunnya, serta adanya upaya Pemerintah Malaysia yang secara lebih masif untuk mengcounter isu buruh migran ilegal di negaranya melalui program *rehiring* dan razia, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peran Pemerintah Joko Widodo ditengah dinamika permasalahan TKI ilegal di negeri jiran tersebut. Selain itu menjadi menarik, ketika kedua negara, sama-sama belum memperbarui MoU yang selama ini menjadi kerangka hukum dalam pengiriman dan perlindungan TKI baik legal maupun ilegal. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah berkomitmen dalam NAWACITA, untuk kembali menghadirkan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia yang nantinya akan diturunkan menjadi program kerja seluruh kementeriannya. Oleh karena itu sebuah penjabaran peran pemerintah

khususnya pada masa Presiden Joko Widodo dirasa perlu untuk mengetahui penanganan masalah TKI ilegal dan sebagai pembanding dengan upaya penanganan pada masa pemerintahan sebelumnya.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu “ *Bagaimana peran Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menangani permasalahan TKI ilegal di Malaysia ?*”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan komitmen dan peran pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo melalui Perwakilan RI dalam menangani permasalahan TKI ilegal di Malaysia dan juga dari dalam negeri.
- b. Untuk mengetahui kompleksitas permasalahan yang dialami oleh para TKI ilegal, baik sewaktu keberangkatan, selama perjalanan, dan sesampainya di Malaysia.
- c. Untuk mengetahui sumber Konsepsi Peran Nasional yang mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan peran untuk menangani permasalahan TKI ilegal di Malaysia.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

a. Akademis

Penulisan ini diharapkan nantinya dapat menjadi sumbangan pemikiran dan informasi bagi mahasiswa Hubungan Internasional serta penulisan-penulisan yang menyangkut permasalahan TKI dan upaya pemerintah terkait dalam menangani permasalahan TKI ilegal. Penelitian ini juga menjelaskan peran Pemerintah Indonesia berdasarkan konsep *Social Protection*, sehingga nantinya konsep tersebut dapat dijadikan sebagai alat analisa atau identifikasi peran negara dalam penelitian terkait migrasi.

b. Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi baru bagi pembaca tentang permasalahan TKI ilegal. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang apa saja permasalahan yang dihadapi oleh TKI ilegal di luar negeri serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Joko Widodo untuk mengatasinya, sehingga nantinya pembaca juga tidak hanya sekedar mengetahui peran pemerintah sekarang namun juga dapat membandingkannya dengan peran pemerintah sebelumnya.



## 1.5 Penelitian Terdahulu

Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana peran pemerintah Indonesia era Presiden Joko Widodo dalam menangani permasalahan TKI ilegal di Malaysia, tentunya penulis harus melakukan review terhadap beberapa penelitian terdahulu guna mengetahui posisi penelitian di antara berbagai penelitian terdahulu. Selain itu juga untuk menemukan berbagai perbedaan dalam segi pembahasan, metode penelitian, dan kerangka teori/konseptual. Terakhir, dengan melakukan penelitian terdahulu, penulis dapat terhindar dari berbagai bentuk plagiasi.

Penelitian pertama adalah milik Fatwa Rizky Ananda yang berjudul “*Perlindungan Pemerintah RI Terhadap TKI Terpidana Mati*”.<sup>13</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis terkait objek penelitian yaitu pemerintah Indonesia melalui Perwakilan RI di Malaysia. Perbedaan penelitian terletak pada fokus, dimana Fatwa berfokus pada upaya perlindungan hukum bagi TKI, khususnya yang terkena hukuman mati. Fatwa menggunakan pendekatan keagamaan yakni *Fiqh Siyasah* terhadap konsep perlindungan dan penempatan TKI berdasarkan UU No.39 Tahun 2004 dan upaya pemerintah RI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penulis menggunakan konsep *Social Protection* untuk menjelaskan berbagai kerentanan TKI berdasarkan 3 determinan dan juga

---

<sup>13</sup> Fatwa Rizky Ananda, *Perlindungan Pemerintah RI Terhadap TKI Terpidana Mati*, Skripsi , Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

menjelaskan peran pemerintah dalam menangani permasalahan TKI ilegal berdasarkan 4 elemen konsep *Social Protection*. Penulis juga menjelaskan pengambilan peran negara berdasarkan Konsep Peran Negara.

Jenis penelitian yang digunakan oleh Fatwa Rizky adalah studi pustaka atau *library research*, yaitu metode penelitian yang didasarkan pada data tertulis atau sumber-sumber tulisan seperti buku, jurnal, dsb. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis* dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum.

Penelitian kedua adalah milik Nissa Juandea dengan judul “*Dampak Penerapan Kebijakan Moratorium Bagi TKI ke Arab Saudi Oleh Pemerintah Indonesia*”.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini Juandea menjelaskan berbagai alasan TKI untuk bekerja diluar negeri yang mencakup tingginya gaji, peningkatan biaya kebutuhan hidup, krisis ekonomi, penopang keluarga, dan banyak lainnya.

Penelitian ini berbeda fokus dan subjek penelitian dengan penulis, dimana penelitian Jueanda berfokus pada penanganan TKI di Arab Saudi dengan subjek penelitian yaitu pemerintah Presiden SBY yang menerapkan moratorium. Penulis berfokus pada penanganan TKI di Malaysia dengan subjek penelitian pemerintah

---

<sup>14</sup> Nissa Juandea, *Dampak Penerapan Kebijakan Moratorium Bagi TKI ke Arab Saudi Oleh Pemerintah Indonesia*, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014, 2(3): 589-600, Kalimantan Timur: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Presiden Joko Widodo melalui instansi-instansi terkait. Penulis juga meneliti berbagai permasalahan dan kerentanan yang dialami oleh para TKI ilegal.

Dalam penelitian ini, Jueanda menggunakan konsep Tenaga Kerja dan definisi term TKI menurut pakar. Untuk menganalisa kebijakan moratorium yang diterapkan oleh Indonesia, Juandea menggunakan Teori Pengambilan Keputusan, berbeda dengan penulis yang menggunakan konsep *Social Protection* untuk menjelaskan peran pemerintah dalam melindungi warganya. Penulis juga menggunakan Konsep Peran Negara untuk menjelaskan faktor-faktor pembentuk konsepsi peran nasional yang mempengaruhi pengambilan peran. Jueanda menggunakan metode penelitian eksplanatif, adapun penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian ketiga adalah milik Badruzzaman dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Saudi Arabia Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Saudi Arabia*”.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini Badruzzaman menjelaskan bahwa aspek perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri berkaitan dengan sistem pengelolaan dan pengaturan berbagai pihak yang terlibat. Indonesia dalam penempatan dan perlindungan TKI telah menetapkan tiga fase mekanisme yaitu pra penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan.

---

<sup>15</sup> Badruzzaman, *Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Saudi Arabia Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Saudi Arabia*, Skripsi (2016), Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Salah satu perbedaan penelitian Badruzzaman dengan penulis adalah pada objek penelitian dimana subjek penelitian penulis adalah peran pemerintah Joko Widodo yang tidak hanya mencakup aspek hukum saja namun juga penanganan TKI ilegal. Penulis menjelaskan berbagai permasalahan dan kerentanan yang dialami oleh para TKI khususnya yang ilegal berdasarkan konsep *Social Protecion* dan konsep Peran Negara. Untuk menganalisa permasalahan, Badruzzaman menggunakan pendekatan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dan Teori Kepentingan.

Jenis penelitian yang digunakan oleh Badruzzaman adalah penelitian kepustakaan dengan sifat penelitian deskriptif-komparatif-analisis dengan pendekatan *normative-yuridis*. Badruzzaman menggunakan data penelitian berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Pengumpulan sumber penelitian Badruzzaman dianalisis dengan logika deduktif, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian keempat adalah milik Mulyadi dengan judul “*Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Pada Masa Presiden SBY*”.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini Mulyadi menjelaskan awal mula migrasi buruh Indonesia adalah pada masa pemerintah

---

<sup>16</sup> Mulyadi, *Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Pada Masa Presiden SBY*, Skripsi (2014), Malang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang

Hindia Belanda pada tahun 1890. Pada waktu itu buruh kontrak Indonesia ditempatkan di Suriname, Afrika Selatan sebagai pengganti budak perkebunan.

Perbedaan penelitian Mulyadi dengan penulis terletak pada fokus penelitian dimana Mulyadi berfokus pada berbagai upaya perundingan bilateral, baik dalam bentuk *agreement* maupun *MoU* terkait penanganan TKI di era Presiden SBY. Adapun penulis berfokus pada upaya pemerintah dalam penanganan TKI ilegal dan juga melakukan penelitian terkait permasalahan dan kerentanan yang dimiliki oleh para TKI ilegal di Malaysia.

Landasan teori/konsep yang digunakan Mulyadi dalam penelitiannya adalah konsep Hak Asasi Manusia, Sekuritisasi, dan Kerjasama Bilateral. Adapun penulis dalam menganalisa peran Indonesia dalam menangani masalah TKI menggunakan konsep *Social Protection* dan konsep Peran Negara. Jenis penelitian yang digunakan oleh Mulyadi adalah sama dengan penulis yaitu deskriptif dengan teknik pengumpulan data kajian pustaka data-data sekunder. Data-data ini kemudian dianalisa dengan metode kualitatif. Selain menggunakan data sekunder, penulis juga menggunakan data-data primer yang diperoleh dari lapangan.

Penelitian kelima adalah milik Linda Sustri dengan judul “*Implementasi UU Republik Indonesia No.39 Th. 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi Pada TKI di Malaysia)*”.<sup>17</sup> Dalam

---

<sup>17</sup> Linda Sustri, *Implementasi UU Republik Indonesia No.39 Th. 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi Pada TKI di Malaysia)*, Skripsi (2010), Malang: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang

penelitian Linda dijelaskan bahwa gelombang migrasi internasional merupakan gejala sosial yang arusnya akan semakin bertambah seiring dengan berkurangnya kapabilitas negara untuk mensejahterakan masyarakatnya. Disamping itu, kesenjangan sosial juga menjadi faktor kenapa masyarakat suatu negara ingin meninggalkan negaranya dan mencari pekerjaan di luar negeri untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik.

Jumlah TKI yang berada di Malaysia pada saat ini melebihi negara-negara lain. Tercatat, sekitar 1,8 juta TKI yang berada di Malaysia, dan 60 persen atau 1,2 juta TKI digaji dengan rata-rata minimal 468 Ringgit Malaysia. Banyaknya TKI yang berada di Malaysia tentunya tidak terlepas dari belenggu kasus-kasus yang menjeratnya. Oleh karena itu pemerintah telah berupaya untuk menangani permasalahan TKI dengan membentuk BNP2TKI dan juga membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Diluar Negeri. Merujuk kepada berbagai permasalahan TKI, Linda berfokus pada bagaimana implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Diluar Negeri khususnya di Malaysia.

Penelitian penulis berfokus pada upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam menangani permasalahan TKI ilegal. Penulis akan meneliti berbagai peran di masa Presiden Joko Widodo, dan meneliti berbagai permasalahan dan kerentanan TKI ilegal di Malaysia berdasarkan konsep *Social Protection* dan

konsep Peran Negara. Dalam penelitian Linda menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka pada data-data sekunder, sedangkan penulis, selain menggunakan data sekunder juga menggunakan data primer.

Landasan teori yang digunakan oleh Linda adalah Liberalisme dan Kerjasama Antar Negara, Hukum Internasional dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Buruh Migran, dan konsep Migrasi, Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Hasil dari penelitian Linda dijelaskan bahwa dengan banyaknya permasalahan TKI di Malaysia telah melahirkan banyaknya tuntutan dari kalangan masyarakat, NGO, LSM, media masa yang menuntut pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap TKI.

Penelitian keenam adalah milik Atika Fauziati dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia yang Terpidana Mati di Luar Negeri dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*”.<sup>18</sup> Dalam penelitian dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya manusia yang banyak. Namun kebanyakan SDM di Indonesia bukanlah tenaga ahli karena kurangnya keahlian dan ketrampilan. Hal ini kemudian tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang berakibat kepada banyaknya pengangguran.

---

<sup>18</sup> Atika Fauziati, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia yang Terpidana Mati di Luar Negeri dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Artikel Ilmiah (2015), Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Oleh karena itu, tidak jarang warga negara Indonesia kemudian mencari pekerjaan di luar negeri untuk menghidupi keluarganya.

Fauziati berupaya menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi TKI yang terpidana mati di luar negeri dalam peraturan perundang-undangan. Fauziati menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan menelaah hukum baik primer, sekunder, tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan yang digunakan untuk meneliti permasalahan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan teknik Analisa data berupa interpretasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada fokus penelitian, dimana fokus penelitian penulis adalah upaya pemerintah Joko Widodo dalam menangani TKI ilegal. Penulis kemudian meneliti berbagai permasalahan dan kerentanan TKI ilegal di Malaysia berdasarkan konsep *Social Protection* dan konsep Peran Negara. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ketujuh adalah milik Andyva Amelia dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di*



*Luar Negeri*".<sup>19</sup> Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pekerjaan adalah sangat penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya sehari-hari. Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Namun fakta di lapangan membuktikan bahwa sulitnya mencari lapangan pekerjaan menjadi salah satu faktor bagi peningkatan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Mengacu kepada permasalahan diatas, Amelia berupaya untuk menjelaskan bagaimana bentuk aspek hukum ketenagakerjaan dari masa pra penempatan, masa penempatan, hingga masa purna penempatan TKI serta bagaimana bentuk perlindungan TKI ditinjau dari UU No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam penelitiannya, Amelia menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Amelia menggunakan pendekatan *case approach*, *conceptual approach*, dan *statute approach*. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah berdasarkan Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Metode pengumpulan data adalah *library research*.

---

<sup>19</sup> Andvya Amelia, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*, Skripsi, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada fokus penelitian dimana penulis berfokus pada peran pemerintah Joko Widodo dalam menangani permasalahan TKI ilegal di Malaysia. Penulis juga akan menjelaskan berbagai permasalahan dan kerentanan yang dimiliki oleh para TKI ilegal berdasarkan konsep *Social Protection* dan analisa peran pemerintah berdasarkan konsep Peran Negara. Dalam hal pengumpulan data penulis tidak hanya mengumpulkan data sekunder namun juga primer.

Penelitian kedelapan adalah milik Linda Asri Andrikasari dengan judul “*Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia Dalam Penanganan Masalah TKI Ilegal*”.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kurangnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat Indonesia mencari rezeki di luar negeri dengan menjadi TKI. Para TKI ilegal di Malaysia biasanya diselundupkan oleh oknum-oknum penyelundupan manusia. Pimpinan direktorat penempatan kerja luar negeri memperkirakan terdapat lebih dari satu juta TKI ilegal pada tahun 2005. TKI ilegal memiliki kecenderungan terhadap kekerasan kerja karena secara resmi mereka tidak mendapatkan perlindungan dan pelayanan dari KBRI setempat. Melihat banyaknya permasalahan terkait TKI ilegal, Andrikasari berupaya untuk menjelaskan bagaimana kerjasama bilateral pemerintah Indonesia-Malaysia dalam penanganan masalah TKI ilegal.

---

<sup>20</sup> Linda Asri Andrikasari, *Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia Dalam Penanganan Masalah TKI Ilegal*, Skripsi, Malang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang

Andrikasari menggunakan jenis penelitian deskriptif dan teknik Analisa kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah melalui *library research* dengan landasan konsep hubungan bilateral. Perbedaan penelitian Andrikasari dengan penulis adalah pada fokus penelitian dimana penulis tidak hanya berfokus pada upaya pemerintah Joko Widodo dalam menangani kasus TKI ilegal di Malaysia berdasarkan konsep Peran Negara, namun juga meneliti berbagai permasalahan dan kerentanan yang dimiliki oleh para TKI ilegal berdasarkan konsep *Social Protection*. Penulis juga akan menjelaskan berbagai peran Perwakilan RI di Malaysia dalam kasus TKI ilegal, adapun Andrikasari berfokus pada upaya pemerintah kedua negara dalam menangani kasus TKI ilegal di Malaysia.

Penelitian kesembilan adalah milik Betti Apriani yaitu “*Peran Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) Dalam Memperjuangkan Hak TKI (Studi Kasus Capta Indonesia)*”.<sup>21</sup> Betti Apriliani menjelaskan bahwa kondisi perekonomian Indonesia yang merosot menciptakan banyak pengangguran. Hal ini kemudian berdampak pada peningkatan minat masyarakat untuk menjadi TKI. Kebijakan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah penerima TKI terkadang tidak berpihak kepada kepentingan-kepentingan TKI, sehingga para TKI di luar negeri kemudian mendirikan organisasi. Selain itu, dengan mendirikan organisasi atau asosiasi para TKI dapat mengurai berbagai permasalahan dan mencari solusi

---

<sup>21</sup> Betti Apriani, *Peran Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Dalam Memperjuangkan Hak TKI (Studi Kasus Capta Indonesia)*, Skripsi (2011), Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

secara kolektif. Rumusan masalah yang digunakan oleh Betti Apriliani adalah untuk mendeskripsikan peran ATKI dalam memperjuangkan hak TKI.

Penelitian Apriani memiliki kesamaan dengan penulis yaitu pada tipe penelitian deskriptif kualitatif. Berikutnya, baik Apriani maupun penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang sama yaitu data primer dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Perbedaan penelitian penulis dan Apriani adalah pada fokus penelitian, dimana penulis berfokus pada peran pemerintah dalam menangani permasalahan TKI ilegal di Malaysia. Apriani menggunakan konsep Organisasi, Konsep, dan Perjuangan Hak dalam penelitiannya, sedangkan penulis menggunakan konsep *Social Protection* dan Peran Negara.

Penelitian kesepuluh adalah milik Desty Purwanti yaitu “*Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Permasalahan PRT di Arab Saudi Tahun 2006-2012*”.<sup>22</sup> Purwanti berfokus pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam kurun tahun 2006-2012 terhadap permasalahan PRT di Arab Saudi karena pada tahun 2006 pemerintah telah membentuk BNP2TKI. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dipengaruhi oleh banyaknya permasalahan TKI di Arab Saudi. Purwanti berupaya untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah dalam menangani PRT Indonesia yang bermasalah di Indonesia. Perbedaan

---

<sup>22</sup> Desty Purwanti, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Permasalahan PRT di Arab Saudi Tahun 2006-2012*, Skripsi (2013), Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

penelitian Purwanti dengan penulis adalah pada fokus penelitian, dimana penulis meneliti tentang peran pemerintah dalam menangani permasalahan TKI ilegal di Malaysia.

Purwanti menggunakan konsep Kebijakan Luar Negeri, Diplomasi, dan HAM, adapun penulis menggunakan konsep *Social Protection* dan Peran Negara. Persamaan penelitian Purwanti dan Penulis adalah pada tipe penelitian yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Purwanti menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yaitu *library research*, sedangkan penulis tidak hanya menggunakan data sekunder, namun juga data primer dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

**Tabel 1.1 Posisi Penelitian**

No.	Judul dan Nama Peneliti	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
1	<p>“<i>Perlindungan Pemerintah RI Terhadap TKI Terpidana Mati</i>”.</p> <p>Oleh: Fatwa Rizky Ananda</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis penelitian : Studi Pustaka atau <i>Library Research</i>,</li> <li>• Sifat penelitian: <i>Deskriptif-Analitis</i></li> <li>• Metode Pendekatan: Yuridis Normatif</li> <li>• Subjek Penelitian : TKI yang dipidana di Malaysia</li> </ul>	<p>Menegaskan pentingnya peran pemerintah berdasarkan prinsip bernegara menurut <i>Fiqh Siyasah</i></p> <p>Negara melakukan upaya diplomasi hingga sanksi bagi negara penerima buruh dan juga melakukan berbagai upaya perundingan untuk memperbaiki skema perlindungan dan pelayanan buruh migran</p>

			<p>Perlunya peran pemerintah yang proaktif dalam melakukan pendekatan dengan korban TKI yang terpidana, karena kurang efektifnya pendekatan dari Satgas TKI</p>
2	<p><i>“Dampak Penerapan Kebijakan Moratorium Bagi TKI ke Arab Saudi Oleh Pemerintah Indonesia”.</i></p> <p>Oleh: Nissa Juandea</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Tenaga Kerja dan Konsep TKI</li> <li>• Teori Pengambilan Keputusan</li> <li>• metode penelitian eksplanatif</li> </ul>	<p>Terdapat faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pengambilan kebijakan moratorium pemerintah Indonesia</p> <p>Faktor internal itu antara lain adalah banyaknya permasalahan TKI di Arab Saudi dan adanya desakan-desakan dari berbagai pihak kepada pemerintah.</p> <p>Faktor eksternal antara lainnya adalah karena belum adanya MoU antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi terkait perlindungan TKI Indonesia dan Arab Saudi mendapatkan pengaruh negative dan positif dari moratorium tersebut</p>
3	<p><i>“Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Saudi Arabia Menurut Hukum</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendekatan hubungan hukum (<i>rechtsbetrekkingen</i>)</li> <li>• Teori Kepentingan</li> </ul>	<p>UU No.13 Tahun 13 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 39</p>

	<p><i>Indonesia dan Hukum Saudi Arabia”</i></p> <p>Oleh: Badruzzaman</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis penelitian kepustakaan dengan sifat penelitian deskriptif-komparatif-analisis Pendekatan <i>normative-yuridis</i>.</li> <li>• Sumber data penelitian berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier</li> <li>• Teknik pengumpulan data dokumentasi.</li> </ul>	<p>Tahun 2004 menjadi bentuk jaminan perlindungan hukum terhadap TKI yang diberikan oleh pemerintah Indonesia.</p> <p>Adapun jaminan perlindungan hukum Arab Saudi adalah berdasarkan Dekrit Raja No. A/91 <i>Basic Law of Governance</i> dan Perundangan Perburuhan yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Saudi Arabia No. M/51.</p> <p>Arab Saudi masih menerapkan sistem <i>kafalah</i> dan <i>iqamah</i> yang kemudian membuat penanganan dan perlindungan TKI oleh pemerintah Arab Saudi masih terbilang lemah</p>
4	<p><i>“Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia Dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja di Indonesia di Malaysia Pada Masa Presiden SBY”.</i></p> <p>Oleh: Mulyadi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Hak Asasi Manusia, Sekuritisasi, dan Kerjasama Bilateral.</li> <li>• Jenis penelitian yang digunakan oleh Mulyadi adalah deskriptif</li> <li>• Teknik pengumpulan data kajian pustaka data-data sekunder. Data-</li> </ul>	<p>Kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia dalam menangani permasalahan TKI di Malaysia pada masa Presiden SBY dari tahun 2004-2012 telah menghasilkan <i>MoU</i>, <i>LoI</i>, hingga protocol perubahan, Namun berbagai upaya ini belum sepenuhnya</p>

		<p>data ini kemudian dianalisa dengan metode kualitatif</p>	<p>dapat menyelesaikan permasalahan TKI di Malaysia.</p> <p><i>MoU</i> antar kedua negara bahkan memiliki legitimasi dihadapan peradilan Malaysia.</p> <p><i>MoU</i> yang dihasilkan kedua negara lebih berat kepada kepentingan Malaysia</p>
5	<p><i>“Implementasi UU Republik Indonesia No.39 Th. 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi Pada TKI di Malaysia)”</i></p> <p>Oleh: Linda Sustri</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian deskriptif</li> <li>• Teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka pada data-data sekunder</li> <li>• Teori Liberalisme dan Kerjasama Antar Negara, Hukum Internasional dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Buruh Migran, dan konsep Migrasi, Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri</li> </ul>	<p>Banyaknya permasalahan TKI di Malaysia telah melahirkan banyaknya tuntutan dari kalangan masyarakat, NGO, LSM, media masa yang menuntut pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap TKI.</p> <p>Pemerintah Indonesia kemudian merespon tuntutan tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Diluar Negeri.</p> <p>Pada implementasi eksternal UU tersebut, pemerintah telah membuat kerjasama dengan pemerintah Malaysia dalam bentuk</p>



			<p><i>MoU</i> terkait penanganan masalah TKI . Dan pada implementasi internal pemerintah telah membentuk BNP2TKI, <i>crisis centre</i>, dan <i>citizen service</i>.</p>
6	<p>“Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia yang Terpidana Mati di Luar Negeri dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”</p> <p>Oleh: Atika Fauziati</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode penelitian hukum normatif</li> <li>• Pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>)</li> <li>• Teknik Analisa data berupa interpretasi</li> </ul>	<p>Pasal 17 PP No.3 Tahun 2013 menjelaskan bahwa pemerintah harus memberikan upaya bantuan hukum seperti pendampingan serta bantuan lainnya juga memberikan upaya diplomatic untuk bernegosiasi dengan keluarga korban.</p> <p>Berbagai konvensi internasional dari ILO tentang perlindungan buruh migran yang telah diratifikasi oleh Indonesia namun belum dibuat menjadi undang-undang nasional sehingga upaya-upaya perlindungan TKI di luar negeri belum maksimal</p>
7	<p>“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis penelitian hukum normatif</li> <li>• Tipe penelitian deskriptif analitis</li> <li>• Pendekatan <i>case approach</i>, <i>conseptual</i></li> </ul>	<p>Penempatan TKI di luar negeri memanfaatkan pasar kerja internasional dengan peningkatan kualitas kompetensi TKI dengan perlindungan sejak</p>

	<p><i>Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri</i>".</p> <p>Oleh: Andyva Amelia</p>	<p><i>approach, dan statute approach.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode pengumpulan data adalah <i>library research</i></li> </ul>	<p>sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga sampai pulang ke Indonesia.</p> <p>Pemerintah melalui UU no.39 Tahun 2004 telah memberikan jaminan bagi perlindungan dan pelayanan TKI selama di luar negeri.</p>
8	<p><i>"Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia Dalam Penanganan Masalah TKI Ilegal"</i>.</p> <p>Oleh: Linda Asri Andrikasari</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis penelitian deskriptif</li> <li>• Teknik Analisa kualitatif</li> <li>• Teknik pengumpulan data adalah melalui <i>library research</i></li> <li>• Konsep hubungan bilateral</li> </ul>	<p>Permasalahan TKI ilegal dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal.</p> <p>Faktor internal adalah karena permasalahan dari TKI seperti misalnya <i>overstay</i> atau lari dari majikan dan memilih untuk menjadi TKI ilegal.</p> <p>Adapun faktor eksternal adalah karena adanya oknum-oknum penyelundupan manusia yang memberikan iming-iming pekerjaan di Malaysia kepada para TKI dengan mudah.</p> <p>Kerjasama bilateral ini terbukti efektif, dimana terdapat penurunan permasalahan TKI ilegal dari tahun 2004-2009 dengan</p>

			banyaknya jumlah pemulangan TKI ilegal.
9.	<p><i>“Peran Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) Dalam Memperjuangkan Hak TKI (Studi Kasus Capta Indonesia)”</i></p> <p>Oleh: Betti Apriani</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe penelitian deskriptif kualitatif</li> <li>• Teknik pengumpulan data primer dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder dikumpulkan dengan cara studi pustaka</li> <li>• Konsep Organisasi, Konsep, dan Perjuangan Hak</li> </ul>	<p>ATKI melakukan sosialisasi untuk menyadarkan, menggerakkan emansipasi, dan menjadi wadah bagi para TKI yang memperjuangkan haknya.</p> <p>ATKI juga membantu dalam pendampingan kasus para TKI, serta menjadi penengah antar pemerintah dan TKI.</p>
10.	<p><i>“Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Permasalahan PRT di Arab Saudi Tahun 2006-2012”.</i></p> <p>Oleh : Desty Purwanti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep Kebijakan Luar Negeri, Diplomasi, dan HAM</li> <li>• Tipe penelitian yaitu penelitian deskriptif kualitatif</li> <li>• Teknik pengumpulan data sekunder yaitu <i>library research</i></li> </ul>	<p>Perekrutan yang dilakukan oleh BNP2TKI dan PJTKI yang bekerja sama dengan pihak swasta tidak sesuai dengan prosedur yang ada dan cenderung tidak bertanggung jawab terhadap PRT tersebut.</p> <p>Aturan-aturan BNP2TKI masih mengalami berbagai masalah pada PRT, pemerintah, dan negara penerima TKI.</p> <p>Pemerintah harus mengupayakan kebijakan perlindungan PRT dalam suatu sistem</p>

			dan mekanisme yang terpadu dan terkoordinir dengan semua pihak.
11.	<p><i>“Peran Pemerintah Indonesia Pada Masa Joko Widodo dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal di Malaysia”</i></p> <p>Oleh: Andi Muhammad Marsianto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian Deskriptif Kualitatif</li> <li>• Teknik Pengumpulan Data Sekunder berupa <i>Library Research</i> dan Data Primer berupa Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi</li> <li>• Konsep <i>Social Protection</i> dan Peran Negara</li> </ul>	<p>Para TKI ilegal yang berada di Malaysia memiliki berbagai kerentanan pada determinan lingkungan, sosial politik, dan sosial budaya.</p> <p>Peran pemerintah dipengaruhi oleh konsepsi peran nasional.</p> <p>Pemerintah kemudian melakukan upaya <i>Social Protection</i> untuk melindungi permasalahan dan kerentanan para TKI ilegal.</p>

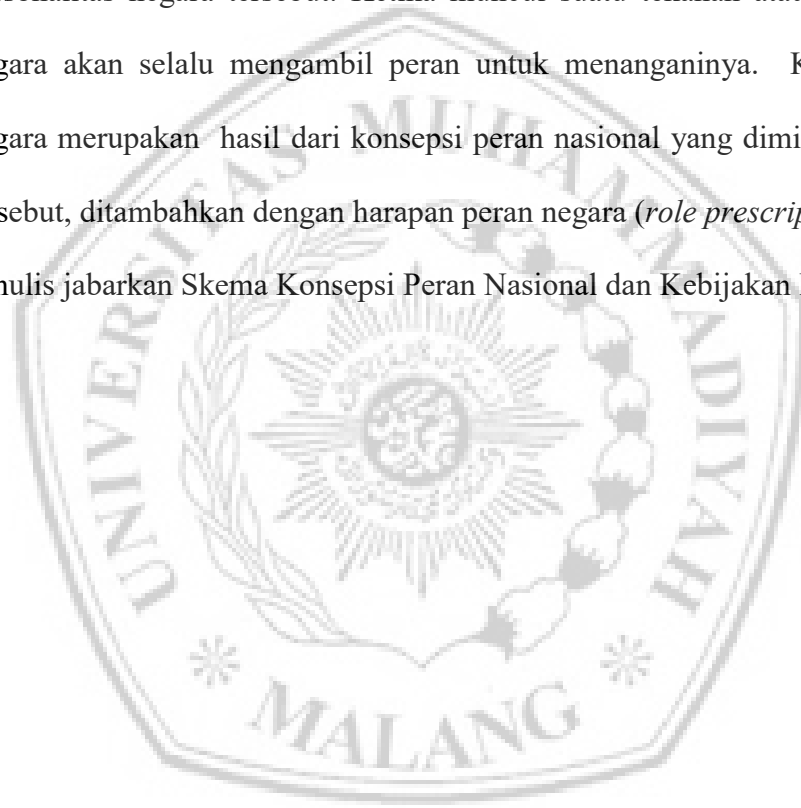
## 1.6 Kerangka Konseptual

### 1.6.1. Konsep Peran Negara

Konsep Peran Negara atau *National Role Conception* pertama kali diperkenalkan oleh K.J Holsti pada tahun 1970. Konsep ini berupaya mengidentifikasi perilaku negara di dalam sistem internasional. Holsti berargumen bahwa setiap negara memiliki peran yang berbeda-beda dengan negara lain. Perbedaan ini salah satunya dipengaruhi oleh sistem atau blok dimana negara itu

berasal. Kedudukan suatu negara didalam sistem internasional yang sama, terkadang berbeda antara satu sama lain, tergantung dari struktur yang ada di dalam sistem tersebut dan posisi negara tersebut.<sup>23</sup>

Peran suatu negara tidak selalunya berhubungan dengan karakteristik atau personalitas negara tersebut. Ketika muncul suatu tekanan atau permasalahan, negara akan selalu mengambil peran untuk menanganinya. Kebijakan suatu negara merupakan hasil dari konsepsi peran nasional yang dimiliki oleh negara tersebut, ditambahkan dengan harapan peran negara (*role prescription*).<sup>24</sup> Berikut penulis jabarkan Skema Konsepsi Peran Nasional dan Kebijakan Luar Negeri.

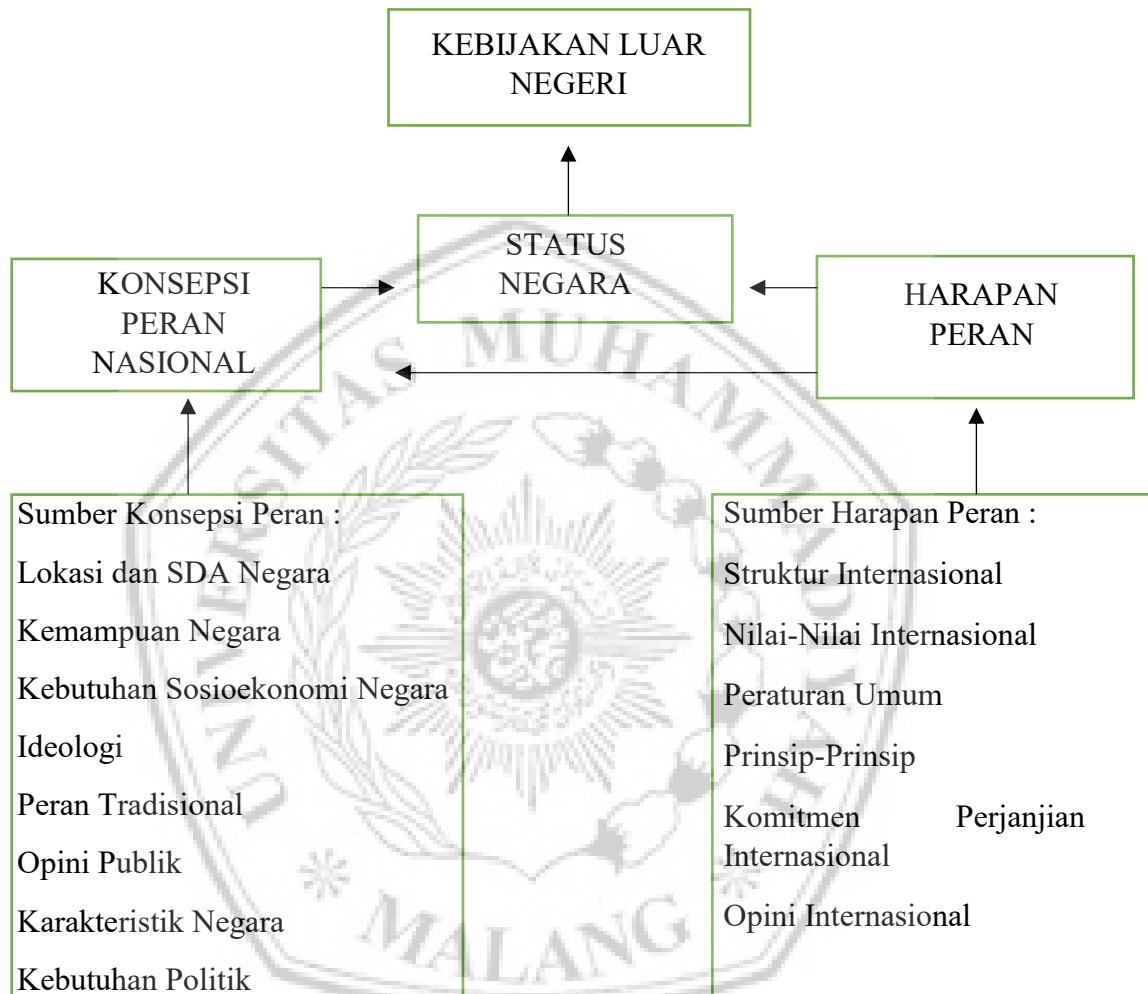


---

<sup>23</sup> K.J. Holsti, 1970, *National Role Conceptions in The Study of Foreign Policy*, International Studies Quarterly Vol.14 Number 3 (September 1970), hal. 233

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 245

**Skema 1.1 Konsepsi Peran Nasional dan Kebijakan Luar Negeri<sup>25</sup>**



Sumber: *National Roles Conception*, KJ. Holsti  
(1970)

<sup>25</sup> *Ibid.*

Lebih lanjut, K.J Holsti membagi peran negara kedalam 17 jenis peran. Berikut akan penulis buat tabel ketujuh belas peran tersebut untuk memudahkan penelitian<sup>26</sup>

**Tabel 1.2 Jenis Peran Negara**

No.	Jenis Peran	Keterangan
1.	<i>Bastion of revolution-liberator</i>	Pemerintah berperan untuk mengorganisir dan memimpin gerakan revolusi di luar negeri
2.	<i>Regional leader</i>	Negara memfokuskan kebijakan luar negerinya untuk meningkatkan perannya di regional sebagai pemimpin atau inisiator
3.	<i>Regional protector</i>	Negara sebagai pelindung kawasan yang <i>concern</i> terhadap berbagai isu keamanan di kawasan
4.	<i>Active Independent</i>	Negara menekankan independensi dalam setiap kebijakan luar negerinya
5.	<i>Liberator supporter</i>	Peran ini memiliki perbedaan dengan <i>bastion of revolution-liberator</i> , pendukung kebebasan tidak mengindikasikan tanggungjawab formal untuk mengorganisir atau memimpin gerakan revolusi di luar negeri, melainkan hanya sebatas dukungan saja.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 261-270

6.	<i>Anti-imperialist agent</i>	Negara dalam menjalankan peran ini melihat imperialisme sebagai sebuah ancaman serius, oleh karenanya negara harus berjuang untuk melawan segala bentuk imperialisme tersebut melalui kebijakan luar negerinya
7.	<i>Defender of the faith</i>	negara yang memandang tujuan dan komitmen politik luar negernya untuk menjaga sistem nilai yang mereka miliki dari berbagai serangan
8.	<i>Mediator-integrator</i>	Negara merasa memiliki kapabilitas, tanggungjawab, dan tugas untuk merekonsiliasi konflik antar negara atau kelompok negara lain
9.	<i>Regional-subsystem collaborator</i>	Negara berkomitmen untuk berperan secara kooperatif dengan negara lain untuk membangun komunitas atau subsistem lintas sektor yang lebih luas lagi
10.	<i>Developer</i>	Peran ini mengindikasikan sebuah tugas atau kewajiban bagi negara khususnya negara maju untuk membantu negara-negara yang belum berkembang
11.	<i>Bridge</i>	Fungsi komunikasi negara sebagai “ <i>translator</i> ” atau penyampai pesan dan informasi kepada masyarakat negara lain.
12.	<i>Faithful ally</i>	Negara sebagai mitra atau aliansi
13.	<i>Independent</i>	Negara membuat kebijakan luar negeri berdasarkan kepentingan nasionalnya



		daripada mendukung tujuan dari negara lain seperti
14.	<i>Example</i>	Peran ini menekankan pentingnya negara untuk mempromosikan prestise atau mencari pengaruh di dalam sistem internasional dengan mengedepankan kebijakan domestik tertentu.
15.	<i>Internal Development</i>	Upaya atau tindakan suatu negara harus diarahkan kepada permasalahan pengembangan internal
16.	<i>Isolate</i>	Pada upaya negara untuk meminimalisirkan keterlibatan faktor/sumber eksternal dalam pembangunan
17.	<i>Protectee</i>	Peran negara yang bergantung pada tanggung jawab dari negara lain untuk mempertahankannya

Dari ketujuh belas yang dijabarkan oleh Holsti, peran Pemerintah Indonesia dalam perlindungan TKI ilegal di Malaysia adalah termasuk jenis *Active Independent*. Peran ini mengedepankan kepentingan negara namun tetap terbuka terhadap kerjasama dengan pihak lain. Dalam hal ini pemerintah telah memberikan komitmennya dalam NAWACITA untuk melindungi kepentingan bangsa.

### 1.6.2. Konsep Social Protection

*Social Protection* atau Perlindungan Sosial sejatinya merupakan sebuah agenda untuk mengurangi kerentanan dan resiko masyarakat dari pendapatan rendah yang tidak dapat menutupi *living cost* baik dari sektor konsumsi maupun jasa.<sup>27</sup> Menurut Wheeler dan Waite dalam karyanya yang berjudul *Migration and Social Protection: A Concept Paper*, perlindungan sosial yaitu:

*“Social protection describes all public and private initiatives that provide income or consumption transfers to the poor, protect the vulnerable against livelihood risks, and enhance the social status and rights of the marginalised; with the overall objective of reducing the economic and social vulnerability of poor, vulnerable and marginalised groups.”*<sup>28</sup>

Wheeler menggarisbawahi tiga faktor penentu (determinan) kerentanan yang sering dialami oleh para migran yaitu; ruang/lingkungan, sosial budaya, dan sosial politik.<sup>29</sup> Berdasarkan penjelasan determinan waktu, migrasi terbagi menjadi tiga, yaitu; transit (keberangkatan), destinasi (kedatangan), dan keluarga yang ditinggalkan. Jika penulis membawa pada konteks TKI ilegal, ketika transit atau semasa keberangkatan para TKI ilegal memiliki kerentanan terhadap bahaya lingkungan. TKI ilegal banyak disalurkan oleh sindikat gelap melalui jalur laut

---

<sup>27</sup> Rachel Sabates-Wheeler dan Myrtha Waite, 2003, *Migration and Social Protection: A Concept Paper*, Sussex: Institute of Development Studies, hal.4

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal.10-11

<sup>29</sup> *Ibid.*,

lepas yang berbahaya. Para TKI ilegal ini juga rentan terhadap musibah karamnya kapal yang mengangkut mereka.

Berikutnya, dilihat dari pengaruh determinan sosial politik, baik semasa keberangkatan dan kedatangan di Malaysia, para TKI ilegal ini sangat rentan terhadap eksploitasi. Karena tidak memiliki dokumen yang sah (paspor), maka secara legal mereka tidak memiliki hak representatif untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai buruh. Mereka tidak memiliki perlindungan hukum secara legal baik dari negara tujuan maupun negara asal karena statusnya yang ilegal.

Pada determinan sosial budaya, baik semasa keberangkatan maupun kedatangan para TKI ilegal ini sangat rentan terhadap pengasingan sosial. Ini karena para TKI ilegal tidak memiliki paspor maupun permit kerja sehingga tidak dapat tinggal dengan bebas di kawasan kerjanya. Mereka harus mencari tempat persembunyian yang aman agar tidak ditangkap oleh penegak hukum.

Berdasarkan 4 elemen dalam konsep *Social Protection* yaitu promotif, transformatif, preventif, dan protektif, Wheeler dan Waite menjelaskan bagaimana peran negara dalam menyediakan perlindungan sosial terhadap para migran ilegal.<sup>30</sup> Pada elemen promotif, negara harus menyiapkan program pengembangan bagi para migran ilegal.<sup>31</sup> Pada elemen transformatif negara harus membuat suatu aturan atau kerjasama bilateral (MoU) dengan negara tujuan TKI, sehingga dapat

---

<sup>30</sup> Rachel Sabates-Wheeler dan Myrtha Waite, *Loc.Cit.*, hal. 16

<sup>31</sup> *Ibid.*

memudahkan administrasi ketenagakerjaan antar kedua negara. Pada level internasional kedua negara harus meratifikasi konvensi ILO terkait perlindungan pekerja migran.<sup>32</sup>

Pada elemen preventif, negara harus memberikan jaminan sosial kepada para migran di negara tujuan juga kepada migran yang telah pulang ke negara asal. Negara harus menekan para majikan untuk menandatangani kontrak kerja dengan buruhnya, untuk menjamin keselamatan kerja dan pemenuhan hak-hak buruh. Berikutnya dalam elemen *Preventive*, Wheeler dan Waite mendorong pemerintah pengirim buruh migran untuk melakukan pendekatan dengan pemerintah penerima buruh migran agar dapat bersama-sama melakukan *inducement* terkait migrasi legal.<sup>33</sup> Terakhir pada elemen protektif, menurut Wheeler dan Waite, negara harus memberikan bantuan dana baik itu dalam bentuk subsidi maupun program pendanaan lainnya kepada para migran di negara tujuan.<sup>34</sup>

Pemerintah Indonesia pada masa Presiden Joko Widodo telah melakukan upaya perlindungan sosial berdasarkan keempat elemen tersebut. hal ini dapat dilihat, seperti misalnya pada elemen protektif, pemerintah melalui seluruh Perwakilan RI di Malaysia menyediakan *shelter* bagi TKI ilegal. Kemudian pada elemen preventif, pemerintah telah memberdayakan seluruh CTKI sebelum berangkat ke Malaysia. Pada elemen promotif, pemerintah telah membuat undang-undang

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 16

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 17

terkait TKI, dan pada elemen transformatif pemerintah telah mendorong Pemerintah Malaysia untuk membuat MoU terbaru terkait pengiriman dan perlindungan TKI ilegal.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1. Tipe Penelitian**

Jenis penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif. Metode penulisan deskriptif adalah metode penulisan yang menggambarkan dan menjelaskan tentang fenomena yang terjadi dan menggambarkan atau menjelaskan gejala atau variabel secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diamati.<sup>35</sup> Penulis melakukan pengamatan terhadap hubungan variabel yang telah tercantum dalam penulisan. Dalam hal ini, penulis ingin mengamati atau meneliti tentang peran pemerintah Joko Widodo melalui Perwakilan RI di Malaysia dalam penanganan permasalahan TKI ilegal di Malaysia.

### **1.7.2. Teknis Analisa Data**

Untuk menganalisis data dari penelitian deskriptif, penulis menggunakan teknik Analisa data kualitatif. Teknik analisa ini digunakan apabila data empiris yang diperoleh bukan merupakan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam struktur

---

<sup>35</sup> Ulber Silalahi, 2009, *Metode Penelitian Sosial.*, Yogyakarta: PT. Refika Aditama, hal. 28

klasifikasi.<sup>36</sup> Teknik analisa ini tidak menggunakan alat bantu analisis seperti perhitungan matematis dan statistik. Menurut Miles dan Huberman, teknik analisa ini memiliki tiga alur kegiatan yaitu:<sup>37</sup>

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar dari sumber data. Pada tahap ini penulis memilih-milah data-data yang relevan dengan penelitian, serta membuang data-data yang tidak diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan untuk ditarik suatu kesimpulan. Melalui penyajian data, baik penulis maupun pembaca nantinya dapat memahami fenomena secara lebih detail dan dapat menganalisa terkait strategi untuk mengatasi fenomena tersebut.

3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah proses pencarian arti suatu benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi, alur sebab akibat, dan proposisi.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 339

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 339-341

### 1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data dilakukan dengan dua metode yaitu observasi dan wawancara. Guna mendapatkan data primer terkait penanganan permasalahan TKI ilegal, penulis melakukan pengamatan langsung atau observasi di Perwakilan RI di Malaysia untuk melihat secara langsung bagaimana peran perwakilan dalam menangani permasalahan TKI ilegal dan juga permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para TKI ilegal. Berikutnya penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait seperti misalnya konsuler dan staff konsuler. Terakhir penulis melakukan dokumentasi terhadap setiap aktivitas pengumpulan data primer.

Data sekunder sangat dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menunjang data primer yang telah dikumpulkan penulis. Data sekunder didapatkan melalui studi pustaka, yaitu teknik dengan mengadakan penulisan kepustakaan dengan mencari, mengumpulkan dan mempelajari serta meneliti data-data yang terkumpul dari buku-buku, jurnal, paper, skripsi, laman website resmi, serta literatur yang relevan dengan pembahasan.<sup>38</sup> Dalam hal ini penulis mengumpulkan sumber data sekunder melalui Rencana Strategis Kemenlu 2015-2019, Situs resmi laporan kerja BNP2TKI, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemenlu 2014 dan 2015, serta LAKIP BNP2TKI, dan mengolah data dari berbagai sumber berita.

---

<sup>38</sup> *Library Research Process*, Elmer E. Rasmuson Library, diakses dari <https://library.uaf.edu/is101-research-process>, (18/04/2017, 19:50 WIB)

#### 1.7.4. Ruang Lingkup Penulisan

##### a. Batasan Waktu

Batasan waktu penelitian penulis adalah dari tahun 2014 dimana Presiden Joko Widodo pertama kalinya dilantik hingga tahun 2017.

##### b. Batasan Materi

Batasan materi pembahasan adalah pada peran pemerintah Indonesia menangani permasalahan TKI ilegal melalui instansi terkait, seperti Kemenlu, BNP2TKI, dan Kemensos. Peran dari pemerintah tersebut kemudian diidentifikasi dan dijabarkan sesuai dengan 4 elemen konsep *Social Protection*.

#### 1.8 Argumen Pokok

Permasalahan TKI ilegal di Malaysia sejauh ini merupakan tanggung jawab bagi Pemerintahan Joko Widodo. Para TKI ilegal ini terpapar terhadap 3 bentuk kerentanan sewaktu pemberangkatan, semasa pemberangkatan ke Malaysia, dan semasa pemulangan ke Indonesia. Permasalahan ini lah yang kemudian menjadi salah satu faktor pengambilan peran pemerintah disamping faktor internal dan eksternal. Pengambilan peran pemerintah juga dipengaruhi oleh dinamika penanganan buruh migran ilegal oleh otoritas Malaysia. Pemerintah Indonesia pada masa Presiden Joko Widodo mengambil peran *active independent* yang mengedepankan kepentingan



nasionalnya, yakni perlindungan terhadap segenap bangsa. Hal ini kemudian dilakukan oleh Pemerintah Joko Widodo dengan melakukan berbagai kebijakan yang dapat diklasifikasikan kedalam 4 jenis elemen upaya perlindungan sosial, yakni elemen protektif, transformatif, promotif, dan preventif.

### **1.9 Struktur Penulisan**

Struktur Penulisan adalah uraian isi bab disertai dengan pokok-pokok bahasan yang akan dikemukakan. Penulisan ini disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut. Pada Bab I terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian terdahulu, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan argumen pokok. Berikutnya pada Bab II adalah penjabaran gambaran umum mengenai permasalahan TKI Ilegal di Malaysia berdasarkan tiga determinan yaitu spasial, sosial budaya, dan sosial politik. Selanjutnya, dijabarkan konsepsi peran nasional berdasarkan faktor internal dan eksternal. Pada Bab III dijelaskan peran *protective* dan *transformative* pemerintah. Peran *promotive* dan *preventive* dijelaskan pada Bab IV. Dan terakhir pada Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.